

PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH PADA KABUPATEN ACEH BESAR

Emmi Suryani¹, Ismail²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

¹emmi.suryani@unmuha.ac.id

Abstract

This research is empirical, where the purpose of this study is to determine the effect of the level of understanding of the principles of accountability, transparency and public participation both partially and simultaneously (together) on the quality of the financial statements of the Aceh Provincial Government. The population in this study were all of the Dinas in Aceh Province as many as 38 Agencies, which included the Secretariat, Offices, Regional Technical Agencies, and Bodies in the Aceh Besar District Government. While 115 people were taken as a sample, the sample of this study will be taken using a proportionate stratified random sampling technique. While the results of testing simultaneously obtained F_{count} of 41,819, while F_{table} at the significance level $\alpha = 5\%$ is equal to 2.686. This shows that $F_{count} > F_{table}$, with a probability level of 0.000. Thus the results of this calculation can be taken as a decision that accepts alternative hypotheses and rejects the null hypothesis, meaning that the variables of accountability (x1), transparency (x2) and public participation (x3), together have a significant effect on the quality of the financial statements of the Agency Aceh Besar Government. While partially the accountability variables (x1), transparency (x2), public participation (x3) also affect the quality of the financial statements of the Government of Aceh Besar.

Keywords: accountability, transparency, public participation and report quality


Abstrak

Penelitian ini bersifat empiris, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik baik secara parsial maupun secara simultan (bersama-sama) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas yang ada di Provinsi Aceh sebanyak 38 Instansi, yang meliputi Sekretariat, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Sementara yang diambil sebagai sampel sebanyak 115 orang, sampel penelitian ini akan diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak berstrata proporsional (proportionate stratified random sampling). Sedangkan hasil pengujian secara simultan diperoleh F_{hitung} sebesar 41.819, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 2.686. Hal ini memperlihatkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan tingkat probabilitas 0.000. Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat di ambil suatu keputusan bahwa menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol, artinya bahwa variabel akuntabilitas (x1), transparansi (x2) dan partisipasi publik (x3), secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Aceh Besar. Sedangkan secara parsial variabel akuntabilitas (x1), transparansi (x2), partisipasi publik (x3) juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Aceh Besar.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dan kualitas laporan

PENDAHULUAN

Permasalahan akuntabilitas publik di Indonesia menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, mulai Januari 2001. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk



menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi, dan efektifitas serta penegakan hukum. Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo 2004:3).

Governance dari sudut penyelenggara negara diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa, mengelola mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks antarwarga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya (yang menghendaki agar hak dan kewajibannya terlaksana) dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka (Mardiasmo, 2004:30).


Fenomena yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar pada penyusunan laporan keuangan terjadi di 23 kabupaten atau kota yang belum menyerahkan laporan pengguna keuangan APBKnya tahun 2016 ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh untuk diaudit (www.serambinews.com pada tanggal 03 mei 2017). Dimana berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran pada Dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Fenomena yang terjadi pada instansi Pemerintah pada Kabupaten Aceh Besar berkaitan dengan masih rendahnya kualitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dinas-dinas pada Pemerintah pada Kabupaten Aceh Besar yaitu adanya kelemahan akuntansi dan pelaporan seperti pencatatan terhadap neraca akuntansi belum dicatat secara lebih akurat dan transparan, sehingga mengakibatkan kualitas laporan menjadi kurang baik yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai. Kualitas rendahnya laporan keuangan dapat dilihat dari kurangnya handalnya pelaporan, kemudian tidak tepat waktu, serta tidak dapat dibandingkan, sehingga mengakibatkan kualitas laporan keuangan menjadi rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Ganie-Rochman(2011:88)menyebutkan*governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-



pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Sedangkan menurut dokumen *United Nations Development Program* (UNDP) yang dikutip oleh Renyowijoyo (2012:18) mendefinisikan *governance* sebagai *the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*.

Krina (2011:34) mengatakan *good governance* diartikan dengan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah tuntunan keterbukaan (*transparansi*), peningkatan efisiensi disegala bidang (*efficiency*), tanggungjawab yang lebih jelas (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Di pihak lain, *Asian Development Bank* dalam Krina (2011:34) menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparansi*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*.

Dengan berbagai pengertian di atas, jelaslah bahwa *good governance* merupakan suatu paradigma yang dituntut untuk diaplikasikan dalam suatu pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat serta pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sendiri.

Kualitas Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan harus mengandung informasi yang berkualitas bagi kebutuhan penggunanya. Menurut Kamus Besar Indonesia (2010:603) kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf.

Kamus Besar Akuntansi (2010:418) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan yang lazim terdiri dari *balance sheet* (neraca), *income statement* (laporan laba rugi) serta *statement of changes in financial position* (laporan perubahan posisi keuangan). Laporan ini ditujukan terutama bagi pembuat keputusan di luar perusahaan, guna memberi informasi tentang kondisi keuangan dari suatu perusahaan serta hasil operasi dari perusahaan tersebut.

Mardiasmo (2012:159) juga mendefinisikan akuntansi dan laporan keuangan sektor publik sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.

Sistem Pelaporan dan Laporan Keuangan

Menurut Darise (2014:238), laporan keuangan pemerintah daerah disajikan sebagai wujud pertanggung jawaban setiap entitas pelaporan, tidak hanya kepada pemerintah pusat tetapi juga kepada masyarakat. selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan formasi yang relevan mengenai posisi keuangan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan menentukan kataatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Prinsip dan Tujuan Pelaporan

Menurut LAN (2011:28) tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Menurut Herbanu (2010:23-24), secara garis besar tujuan umum pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial.

Hipotesis

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

- H_{a1} : Prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- H_{a2} : Prinsip akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- H_{a3} : Prinsip transparansi berpengaruh parsial terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- H_{a4} : Prinsip partisipasi publik berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*) yang diolah dengan program komputer SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kualitas Laporan Keuangan
α	=	Konstanta
b_1, b_2, b_3	=	Koefisien Regresi
X1	=	Akuntabilitas
X2	=	Transparansi
X3	=	Partisipasi Publik
e	=	<i>Error term</i>

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dua cara:

a. Uji F (secara bersama-sama)

Uji F dilakukan untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen (prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah). Keputusan yang diambil berdasarkan pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ (5%), dengan pertimbangan: apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis yang diajukan tersebut diterima. Sedangkan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis yang diajukan tersebut ditolak.

b. Uji t (secara parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan yang diambil berdasarkan pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ (5%), dengan pertimbangan: apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis yang diajukan tersebut diterima. Sedangkan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis yang diajukan tersebut ditolak. Analisis data dari seluruh model persamaan dalam penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan paket program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 15.0.

HASIL ANALISIS

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada para responden yaitu para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yang terdiri dari Kepala Bidang/ Kepala Bagian (Kabid/ Kabag), Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi (Kasubbag/ Kasubbid/ Kasi), dan para staf di bidang program dan pelaporan yang berada di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Setelah kuesioner selesai diisi oleh responden, peneliti mengambil kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan program SPSS 15.0 Adapun lama waktu yang digunakan responden dalam mengisi dan mengembalikan kuesioner berbeda-beda, namun rata-rata responden mengembalikannya dalam waktu satu minggu.

Dari jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 115 lembar kuesioner telah dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100,0 persen, sehingga jumlah sampel akhir untuk penelitian ini berjumlah 115 orang atau ($n = 115$).

Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik Terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Seperti yang dikemukakan pada perumusan masalah dan hipotesis, penelitian yaitu menganalisis pengaruh akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2) dan partisipasi publik (x_3) sebagai variabel bebas (independen variabel) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai variabel terikat (dependen variabel) baik secara simultan maupun parsial, maka untuk menjelaskan didasarkan kepada analisis regresi berganda. Analisis diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.188 + 0.163x_1 + 0.164x_2 + 0.127x_3 + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

Koefisien Regresi (b)

- Konstanta sebesar 2.188. Artinya jika faktor-faktor akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2) dan partisipasi publik (x_3), dianggap konstan, maka besarnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.188 pada satuan skala likert atau kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih dikatakan rendah, hal ini apabila akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik tidak mengalami perubahan atau bersifat tetap.



- Koefisien regresi akuntabilitas (x1) sebesar 0.163. Artinya bahwa setiap 100% perubahan/perbaikan, dalam variabel akuntabilitas, maka secara relatif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 16.3%, dengan demikian semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- Koefisien regresi transparansi(x2) sebesar 0.164. Artinya setiap 100% perubahan /perbaikan, dalam variabel transparansi, maka secara relatif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 16.4%, jadi dengan adanya transparansi, maka secara relatif akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar .
- Koefisien regresi partisipasi publik (x3) sebesar 0.127. Artinya setiap 100% perubahan /perbaikan, dalam variabel partisipasi publik, maka secara relatif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 12.7%, jadi dengan adanya partisipasi publik akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel yang diteliti, ternyata variabel transparansi (x2) mempunyai pengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dengan nilai koefisien sebesar 0.164, kemudian diikuti oleh variabel akuntabilitas (x1) yang diperoleh dengan nilai koefisien sebesar 0.163 dan variabel partisipasi publik (x3) dengan nilai koefisien sebesar 0.127.

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Untuk melihat hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan korelasi dan determinasi. Koefisien korelasi (R) = 0.728 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 72.8%. Artinya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat erat hubungannya dengan faktor akuntabilitas (x1), transparansi (x2), partisipasi publik (x3). Hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dapat dijelaskan bahwa indikator yang diteliti mempunyai hubungan yang sangat kuat.

Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0.531. Artinya sebesar 53.1% perubahan-perubahan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor akuntabilitas (x1), transparansi (x2), partisipasi publik (x3). Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 46.9% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain diluar daripada penelitian ini.

Pembuktian Hipotesis

Dalam membuktikan hipotesis alternatif bahwa terdapat pengaruh secara langsung antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui indikator akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik, hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sampai 0.002 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa semua indikator yang diteliti berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dimana akuntabilitas (x1), transparansi (x2), dan partisipasi publik (x3) sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas (x1), transparansi (x2) dan partisipasi publik (x3), secara simultan juga berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Penelitian ini sesuai dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Amrullah (2008) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh tingkat pemahaman prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dikabupaten Bireun. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah.

KESIMPULAN

Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Aceh Besar, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.163. Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Aceh Besar, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.164. Partisipasi publik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Aceh Besar, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.127. Sedangkan secara simultan dijelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Aceh Besar, dengan nilai $F_{hitung} 41.819$, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 2.686.

Saran

Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya. Mengenai variabel dan responden, agar penelitian berikutnya lebih representatif dalam menentukan dan memilih penambahan bahkan penggantian dari penelitian sebelumnya. Demi menunjang hasil penelitian yang lebih baik dan lebih luas. Pada penelitian berikutnya mencoba dengan menggunakan statistik non-parametrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. 2008. Pengaruh Tingkat Pemahaman Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Aparatur dipemerintah daerah di Kabupaten Bireun. Skripsi, Universitas Syiah Kuala.
- Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, edisi S I. Pusat Pengembangan Akuntansi, Jakarta.
- Bastian, I., dan Gatot S. 2012. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Coryanata, I. 2014. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makassar: Simposium Nasional AkuntansiX.
- Darise, N. 2014. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Gorontalo: PT. Indeks.
- Garnita, N. 2008. *Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (studi kasus pada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik)*. Universitas Widyatama, Bandung.
- Ganie, R. 2011. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara yang Baik)*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Herbanu, I. 2012. *Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam Pemerintah. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah: Seri Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Irvan, R. 2008. *Hubungan Prinsip-Prinsip Good governance dan Kinerja RAPBD*. Skripsi, Universitas Syiah Kuala.
- Lalolo, L.K.P. 2011. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat *Good Publik Governance*. Bappenas.
- LAN dan BPKP. 2011. *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN dan BPKP.
- Mahmudi. 2012. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2012. *Perwujudan Transpransi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2, No.1:1-17.

- 
- Miftah, T. Birokrasi dan Politik di Indonesia. 2011. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pangestu, D.W. 2014. Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen. www.ilmu.komputer.com
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Keuangan Negara.
- Undang- Undang No. 1 Tahun 2012 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang- Undang No. 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Keuangan Negara.
- Undang- Undang No.32 Tahun 2012 Tentang Pemerintah daerah.
- Undang-Undang No. 58 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2012 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rosjidi. 2011. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar, dan Metode. Aksara Satu: Surabaya.
- Sekaran, U. 2012. *Research Methods For Business* (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis). Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Solikin, A. 2012. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: perkembangan dan permasalahan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2, november. Pp: 1-15.
- Sholeh, A.R. 2010. Adanya Upaya Intervevsi terhadap BPK. www.serambi.news.com
- Tim Penyusunan kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wigono, Y.S. 2012. Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance*. Jurusan Pemerintah FISIP Universitas Lampung.